



Peran Leadership Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Edyanto¹, Asmadianto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP YAPIS Biak, Indonesia.

Abstrak

Peran kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan terselenggaranya prinsip-prinsip good governance dalam layanan publik. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik Peran Leadership Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, meliputi jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik desk research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan artikel dari berbagai sumber terbit. Analisis data dilakukan melalui metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 peran pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu; Peran pengambil keputusan, peran mempengaruhi, peran motivasi, Peran antar pribadi, dan peran informasional.

Kata Kunci: Leadership, Good Governance, Pelayanan Publik.

Pendahuluan

Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia butuh orang lain dalam berinteraksi di lingkungannya. Manusia hidup berkelompok, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Hidup dalam kelompok tentunya tidak mudah. Untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup, anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Keteraturan dalam hidup perlu selalu dijaga. Hidup

yang teratur adalah impian setiap insan, menciptakan kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Manusia dianugerahi kemampuan berfikir, kemampuan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan kelebihan itu seharusnya manusia dapat mengelolah lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan saja yang perlu dikelola dengan baik, tetapi kehidupan sosial manusia pun perlu dikelola dengan baik juga, untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berjiwa pemimpin.



Tidak untuk dirinya saja tetapi untuk orang lain juga.

Dengan jiwa pemimpin manusia akan dapat mengelolah dirinya sendiri, kelompoknya dan lingkungan hidupnya (Edyanto, 2018). Khususnya dalam penyelesaian masalah yang rumit. Disinilah dituntut kebijaksanaan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat diselesaikan dengan baik (Syafii et al., 2015). Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Chung, 2019). Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikut-pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi (Purwanto et al., 2020).

Pimpinan atau atasan merupakan orang yang paling tepat untuk mengambil inisiatif dalam usaha

menciptakan hubungan yang baik diantara orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi, karena pimpinan merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap jalannya roda pemerintahan (Eko Purnomo, 2018). Menciptakan hubungan yang baik merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga karena unsur manusiawi merupakan unsur yang paling penting yang menentukan sukses tidaknya roda pemerintahan tersebut (Khan, 2008). Konsep good governance sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan (Greenwood et al., 2021). Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan, disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan



kebijakan (Ulibarri et al., 2020). Beberapa pakar dan teoritis administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan (Syafii et al., 2015).

Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik (Adriyan Saptawan, 2013). Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini (Ami Jayanti & Nazwirman, 2020). Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta (Lewerissa & Edyanto, 2024). Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah (Capuno et al., 2024).

Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerintahan (*good governance*) (Iriawan & Edyanto, 2023). Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik/*good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah diera otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum (Phelan et al., 2020). Paling tidak syarat agar terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini (Isakh et al., 2020).



Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan impian sekaligus harapan semua bangsa di dunia. Pandangan tersebut dapat dimengerti karena melalui pelaksanaan *good governance*, upaya penciptaan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari tindakan yang tidak terpuji serta tidak berpihak pada kepentingan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan secara nyata (Mahsyar, 2011). Selain itu, pelaksanaan *good governance* juga akan bersentuhan atau berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah yang kemudian berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelaksanaan *good governance* sudah selayaknya menjadi komitmen semua untuk mewujudkannya. Sudah tidak pada tempatnya jika masih ada sebagian pihak yang berhasrat untuk menunda-nunda pelaksanaan *good governance* tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah (lokal). Penundaan atau keterlambatan dalam menterjemahkan konsep *good governance* secara nyata

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintah, hanya akan menambah beban dan penderitaan bagi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik Peran Leadership Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, meliputi jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik desk research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan artikel dari berbagai sumber terbit. Analisis data dilakukan melalui metode analisis tematik.

Hasil dan Pembahasan

Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dimana pemimpin merupakan titik



tombak dari suatu kelompok/masyarakat maupun dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembangunan. Pemimpin selalu menciptakan adanya partisipasi bawahan, oleh karena itu pemimpin harus pandai membimbing, memotivasi, menggerakkan bawahannya sehingga dapat mengetahui dan merasakan bahwa dirinya turut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sebab berhasil tidaknya organisasi tergantung dari bagaimana peranan itu dijalankan dimana pemimpin sebagai pengambil keputusan sekaligus juga pemimpin dan bawahan pelaksana tugas kegiatan. Menurut Pasolong (2008: 38), peranan pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Peran pengambil keputusan

Peran pengambil keputusan yaitu pemimpin birokrasi sebagai *top manager* khususnya, memiliki kewenangan mengambil keputusan. Dalam hal ini menetapkan sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, pertunjukan tanggung jawab, dan

pengaturan kegiatan-kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan pengorganisasian unit kerja yang efisien, serta adaptasi kepada sebuah lingkungan yang berubah-ubah. Aspek paling penting dari kebanyakan bentuk pengambilan keputusan adalah memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya diantara berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingan relatifnya, termasuk perencanaan pengembangan prosedur untuk melakukan tanggapan secara cepat dan efektif terhadap masalah-masalah krisis yang tidak dapat dihindari.

2. Peran Mempengaruhi

Peran mempengaruhi yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan program kerja. Pemimpin birokrasi dapat mengembangkan berbagai tehnik mempengaruhi bawahan dan ini sebenarnya mudah bagi pemimpin birokrasi publik karena kewenangan atasan sangat tinggi. Ada beberapa hal



yang perlu diperhatikan agar peran mempengaruhi bawahan efektif yaitu :

- a. Menjadikan seorang pemimpin birokrasi yang jujur, adil terhadap bawahan tanpa pilih kasih. Berusaha memberikan contoh dalam bekerja dan bertindak.
- b. Bersikap arif dan bijaksana terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran.
- c. Senantiasa melibatkan bawahan dalam berbagai kegiatan.
- d. Tumbuhkan rasa percaya diri pada bawahan, bahwa mereka memiliki kemampuan dan etos kerja yang tinggi.
- e. Usahakan bawahan tetap merasa dihargai dengan menjadikan mereka sebagai partner atau tim kerja.

3. Peran Motivasi

Peran motivasi yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran motivasi akan mudah dilakukan. Sebaliknya jika pemimpin tidak mampu menanamkan

pengaruh terhadap bawahannya, maka sulit baginya untuk melakukan motivasi.

Dalam memotivasi hendaknya pemimpin memahami benar-benar karakter bawahan yang berbeda kemampuan, pengetahuan dan perilaku.

4. Peran antar pribadi

Peran antar pribadi yaitu peran strategik pada peran antar pribadi dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Pemimpin harus menampilkan perilaku yang baik dan benar seperti etos kerja yang tinggi, disiplin dan sikap positif lainnya. Pemimpin birokrasi harus menampilkan diri sebagai penuntun, pemberdaya dan pendorong bagi bawahannya.

5. Peran informasional

Peran informasional yaitu peran yang dimiliki oleh seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinnya. Peran informasional adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-



rencana kebijakan-kebijakan, serta harapan peran dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otoritas rencana tindakan untuk mencapainya. Peranan pemimpin dalam menjalankan tugas pokoknya maka akan menciptakan prinsip-prinsip good governance yang menjadi titik fokusnya yaitu terbuka (transparansi); partisipasi (participation); dan cepat tanggap (responsive).

Kesimpulan

Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) bukanlah hal yang mudah, namun perlu kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan dari pemimpin. ada 5 peran pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu; Peran pengambil keputusan, peran mempengaruhi, peran motivasi, Peran antar pribadi, dan peran informasional. Seorang pemimpin dalam memotivasi harus menyadari bahwa orang akan mau bekerja keras dengan harapan bahwa ia akan dapat

memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan dari hasil pekerjaannya.

Referensi

- Adriyan Saptawan. (2013). Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Indikatornya serta Model Pengukurannya. *Desentralisasi*, 11(1), 325–334.
- Ami Jayanti, G., & Nazwirman, N. (2020). Model Kinerja Pegawai: Kepemimpinan, Budaya Kerja, dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan kerja variabel intervening. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 157–173.
<https://doi.org/10.30596/jimb.v21i2.4582>
- Capuno, J., Corpuz, J., & Lordemus, S. (2024). Natural disasters and local government finance: Evidence from Typhoon Haiyan. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 220(February), 869–887.
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.03.007>
- Chung, C. S. (2019). A comparative study of digital government policies, focusing on E-Government acts in Korea and the United States. *Electronics (Switzerland)*, 8(11).
<https://doi.org/10.3390/electronics8111362>
- Edyanto, K. (2018). Leadership Bupati Dalam Pembangunan Di Kabupaten Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw). *Sosio E-Kons*, 10(2), 143–149.
- Eko Purnomo. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi. *Sosio E-Kons*, 10(1), 28–38.



- Greenwood, S., Singer, L., & Willis, W. (2021). Collaborative governance: Principles, processes, and practical tools. In *Collaborative Governance: Principles, Processes, and Practical Tools*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003172062>
- Iriawan, H., & Edyanto. (2023). The Role Of Local Government In Empowering Fishing Communities In Biak Numfor Regency. *Jurnal Evolusi*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.61688/jev.v4i2.80>
- Isakh, I. H., Rossa, J. C., Narendragharini, K. S., & Putri, K. S. (2020). Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 87–98. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.9386>
- Khan, S. (2008). Local governments and local elites. *Local Government Studies*, 34(4), 509–528. <https://doi.org/10.1080/03003930802217470>
- Lewerissa, C. M., & Edyanto. (2024). Contested local power in influencing regional development planning in Nabire Papua, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 362–376.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1665–1685. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>
- Purwanto, A., Asbari, M., Prameswari, M., Ramdan, M., & Setiawan, S. (2020). Dampak Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Perilaku Kerja Inovatif Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(01), 19–27. <https://doi.org/10.33221/jikm.v9i01.473>
- Syafii, L. I., Thoyib, A., Nimran, U., & Djumahir. (2015). The Role of Corporate Culture and Employee Motivation as a Mediating Variable of Leadership Style Related with the Employee Performance (Studies in Perum Perhutani). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 1142–1147. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.152>
- Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Jager, N. W., Newig, J., & Weber, E. (2020). How does collaborative governance evolve? Insights from a medium-n case comparison. *Policy and Society*, 39(4), 617–637. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1769288>